

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

OLEH
ROSHANTY, S.H
1520112037



KOMISI PEMBIMBING

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H
NIP. 19600625 198603 1 003

Dr. Sukanda Husin, S.H., LL.M.
NIP. 19570422 198603 1 002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

(Roshanty, S.H., NIM: 1520112037, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Jumlah Halaman 184, Tahun 2017)

ABSTRAK

Perkembangan zaman tidak hanya merubah cara manusia memandang dirinya dan lingkungan, namun juga mengubah pola interaksi yang mendorong berkembangnya subjek hukum selain manusia. Subjek hukum itu adalah korporasi dengan segala kompleksitasnya. Saat ini, korporasi memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian dunia. Disisi lain, perkembangan korporasi menimbulkan persoalan baru, yaitu lahirnya kejahatan-kejahatan baru yang pelakunya adalah korporasi itu sendiri. Kejahatan korporasi tidak bisa dipandang sebagai kejahatan biasa, kejahatannya sangat terorganisir, dan digolongkan pada kejahatan kerah putih. Salah satu kejahatan korporasi adalah kejahatan di bidang lingkungan hidup khususnya terkait dengan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan perkebunan. Akibat pembakaran tersebut, Negara merugi berkali lipat lebih banyak. Salah satu contoh biaya besar yang musti dikeluarkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan. Sebagai Negara dengan wilayah hutan yang luas, Indonesia telah membuat pengaturan sedemikian rupa untuk melindungi lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup yang diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Namun keberadaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ternyata tidak mampu secara efektif mencegah terjadinya pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Persoalannya terletak pada penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi. Walaupun UU PPLH telah mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, perdebatan terkait bentuk pertanggungjawaban tersebut masih terjadi ditataran norma, bahkan penerapan oleh aparat penegak hukum. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: 1). Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana dengan membuktikan unsur kesalahan dari korporasi dalam hukum pidana lingkungan hidup? 2). Bagaimana konsep pemidanaan terhadap korporasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dikaitkan dengan pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *doctrinal reserch*. Dalam praktek, putusan kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia umumnya memakai doktrin Identifikasi dan doktrin *corporate culpability*. Seyogyanya untuk mencapai tujuan penjeratan, penggunaan doktrin identifikasi dan doktrin *corporate culpability*, yang terdiri dari doktrin *Corporate Reactive Fault*, *Corporate Preventive Fault*, *Corporate Culture*, *Corporate Policy*, lebih tepat, karena relevan dengan konteks permasalahan hukum yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; Korporasi; Lingkungan Hidup.